

BAB IV

DUKUNGAN POLITIK DAN KEBIJAKAN





DUKUNGAN POLITIK DAN KEBIJAKAN

Apabila dirunut ke belakang, arah dan pola pengembangan sektor pertanian sangat ditentukan oleh kebijakan rejim yang berkuasa. Sebagai contoh, budidaya padi sudah menjadi prioritas untuk dikembangkan sejak jaman kerajaan, karena telah dijadikan sebagai bahan pangan pokok. Namun kedatangan bangsa Eropa ke bumi Nusantara telah mengarahkan pada usaha tanaman perkebunan yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Pada masa pendudukan Jepang, basis komoditas yang harus dikembangkan oleh petani pribumi sedikit berbeda dibandingkan dengan era Hindia Belanda, yaitu beras dan tanaman bahan baku tekstil. Memasuki era kemerdekaan, arah dan kebijakan pembangunan pertanian berkuat pada upaya swasembada pangan, yang direduksi hanya pada beberapa komoditas utama saja, seperti beras, jagung, dan kedelai. Fakta ini menegaskan bahwa sadar atau tidak sadar, pendekatan komoditas telah sejak awal dijadikan pilihan utama dalam kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia.

Pendekatan komoditas bukanlah pilihan yang salah seandainya dalam pengelolaannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Namun kritik utama terhadap era revolusi hijau yang cenderung sangat intensif dalam mengembangkan beberapa bahan pangan pokok, sehingga cenderung tidak ramah lingkungan dan menimbulkan ketimpangan pembangunan; mendorong banyak pihak untuk memperbaiki kebijakan pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pendekatan pembangunan pertanian berbasis ekoregion. Namun mengubah pendekatan komoditas yang telah terbukti mampu mendorong peningkatan produksi pertanian secara spektakuler ke pendekatan ekoregion (wilayah) bukanlah pekerjaan yang mudah dan perlu dukungan politik dan kebijakan yang kuat dan konsisten. Untuk itu, bab ini secara khusus mengulas mengenai pentingnya dukungan politik dan kebijakan pembangunan pertanian yang dapat memperbaiki pendekatan komoditas ke arah ekoregion.

Tatkala Indonesia memasuki era reformasi semestinya pendekatan pertanian berbasis komoditi mulai berangsur-angsur beralih ke pendekatan berbasis wilayah seiring dengan perubahan pola pemerintahan dari pendekatan sentralisasi menjadi desentralisasi. Namun lagi-lagi pemerintah dewasa ini kembali mencanangkan politik swasembada pangan sehingga masih terperangkap dengan pendekatan komoditas (*commodity trap*). Walaupun wilayah dan komoditas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun secara konseptual ada perbedaan yang mendasar antara kedua pendekatan tersebut. Pendekatan komoditas sudah barang tentu fokus kebijakannya adalah pengembangan komoditas tertentu (komoditas di luar yang ditetapkan tidak menjadi prioritas); sementara pendekatan wilayah adalah pengembangan berbagai potensi komoditas yang ada dalam suatu wilayah, dimana integrasi komoditas, skala ekonomi, dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air sehamparan dan/atau antar wilayah lebih diutamakan.

Peran ekoregion (ekosistem lokal) sangat nyata dalam membentuk dan menentukan arah kegiatan produktif kelompok sosial yang berada di dalamnya. Dalam pembangunan sektor pertanian, kondisi biofisik suatu ekoregion dalam beberapa hal dapat mendikte jenis komoditas yang dapat diusahakan, kapan dan berapa luas, dan berapa banyak. Secara ringkas kondisi suatu ekoregion mewakili jargon Badan Litbang Pertanian dalam kaitannya dengan pengembangan teknologi spesifik lokasi. Upaya-upaya dan tindak eksplorasi dan eksploitasi berlebih (*over-exploitation*) atas suatu sistem ekologi yang menopang kehidupan sistem sosial mampu mengubah kondisi suatu ekoregion ke dalam kondisi yang tidak diharapkan. Salah satu contohnya adalah pengurusan air secara tidak terkendali seiring dengan pertumbuhan populasi, perkembangan industri dan upaya ekstensifikasi sektor pertanian, telah menyebabkan berbagai wilayah di dunia menderita kekurangan dan kehilangan sumber air.

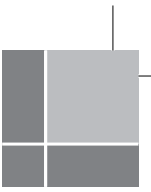
Ada dugaan bahwa krisis pangan akan semakin pendek siklusnya dan semakin terkait dengan krisis politik yang melanda berbagai negara dan tidak bisa lepas dari stabilitas ekonomi politik nasional maupun global. Krisis pangan global akan mempengaruhi krisis ekonomi dunia yang telah melanda beberapa negara. Indonesia dalam kurun waktu 2014–2019 akan berada di persimpangan jalan yaitu apakah Indonesia akan mampu menghadapi pemasalahan dan tantangan krisis pangan dengan melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang memperlemah kemampuan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional serta mempersiapkan politik pertanian dan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif dalam jangka panjang; ataukah Indonesia akan larut dalam krisis pangan yang lebih parah dan yang pada gilirannya akan mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi dan politik dimasa yang akan datang.

Untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia, salah satu alternatif yang perlu ditempuh adalah membangun kemampuan inovatif pada sistem pertanian dalam wilayah ekoregion, khususnya di lahan kering. Selama ini inovasi yang dihasilkan masih cenderung didominasi oleh komoditi padi di lahan sawah dan belum banyak menyentuh sistem penelitian di lahan kering dan ekosistem lainnya. Fokus kebijakan pada lahan sawah nampaknya masih akan terus berlanjut, karena dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, pemerintah masih menempatkan kebijakan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai sebagai prioritas utama. Fakta ini semakin memperkuat perlunya dukungan politik dan kebijakan yang dapat mengarahkan pendekatan pembangunan pertanian pada pengelolaan sumberdaya secara lebih optimal.

Politik pertanian yang berorientasi komoditas telah menjadi salah satu pemicu terjadinya sindroma wilayah. Ada tiga sindroma yang penting untuk dicermati, yaitu: (a) sindroma Jawa yang terkait dengan fenomena konversi lahan pertanian ke non pertanian yang terus berlanjut; (b) sindroma sumatera yang terkait dengan masifnya penggunaan lahan (khususnya lahan kering) untuk perkebunan kelapa sawit; dan (c) sindroma silo yang terkait dengan pengembangan komoditi yang berjalan sendiri-sendiri, sehingga pemanfaatan sumberdayanya tidak optimal.

Kementerian Pertanian sebenarnya telah mempunyai konsep pembangunan pertanian yang mengandung prinsip-prinsip ekoregion, yaitu pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan. Bahkan konsep tersebut telah dijadikan sebagai visi dan misi dalam Renstra Kementan 2015-2019. Namun mencermati kebijakan pembangunan pertanian yang sedang dan akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan, nampaknya pertanian bioindustri berkelanjutan masih akan dilakukan sebatas pengembangan model dan masih perlu waktu untuk diarahkan pada program pembangunan pertanian di Direktorat Jenderal Teknis. Untuk itu, dalam masa transisi ini perlu dirumuskan konsep operasional dari pendekatan pertanian bioindustri berkelanjutan yang lengkap dan komprehensif; sehingga pada saatnya dapat mulai dilaksanakan setahap demi setahap.

Terkait dengan penelitian sistem pertanian, arus utama penelitian dan pengembangan selama ini cenderung terfokus pada masalah masalah spesifik dengan mempelajari elemen-elemen adaptasi, seperti toleransi terhadap kekeringan, banjir, perubahan temperatur, hama penyakit; yang direpresentasikan oleh temuan varietas yang dianggap resisten terhadap gejala gejala tersebut; dari pada mempelajari upaya-upaya memperbaiki integritas ekosistem secara utuh pada berbagai jenjang untuk menunjang keberlanjutan pembangunan pertanian dalam jangka panjang. Pendekatan yang bersifat reaktif dan adaptif sudah tidak memadai untuk menghadapi persoalan kehidupan dan pembangunan yang semakin kompleks. Diperlukan proses pemahaman yang berulang-ulang untuk memungkinkan para inovator termasuk masyarakat petani membangun kemampuan antisipatif dalam menghadapi kompleksitas permasalahan. Proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat



belajar (*learning society*). Kebijakan pemerintah Thailand yang secara konsisten mendukung pengembangan program *one village one product* (OVOP) merupakan salah satu contoh keberhasilan membangun *learning society*.

